

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan kestabilan perekonomian dapat dikatakan merupakan permasalahan setiap negara ataupun daerah, termasuk Propinsi Sumatera Utara. Ada banyak usaha melalui berbagai kebijakan telah diterapkan demi meningkatkan atau setidaknya mempertahankan kestabilan perekonomian yang diharapkan akan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Salah satu usaha tersebut adalah melalui pengendalian laju inflasi. Dengan kata lain inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi peningkatan harga-harga barang dan jasa secara terus menerus.

Tingkat inflasi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran barang dan jasa yang mencerminkan perilaku para pelaku pasar atau masyarakat. Fluktuasi dalam keseluruhan perekonomian berasal dari perubahan penawaran agregat atau permintaan agregat. Para ekonom menyebut perubahan dalam penawaran dan permintaan agregat ini sebagai guncangan (shock) terhadap perekonomian. *Internal Monetary Shock* atau guncangan pada variabel moneter domestik tersebut bisa berupa adanya perubahan kebijakan oleh otoritas moneter, seperti kebijakan moneter ekspansif atau kontraktif, yang dapat berpengaruh terhadap timbulnya *money supply shock* dan *interest rate shock*. Sehingga adanya shock pada variabel moneter secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap permintaan agregat dan selanjutnya terhadap outputnya.

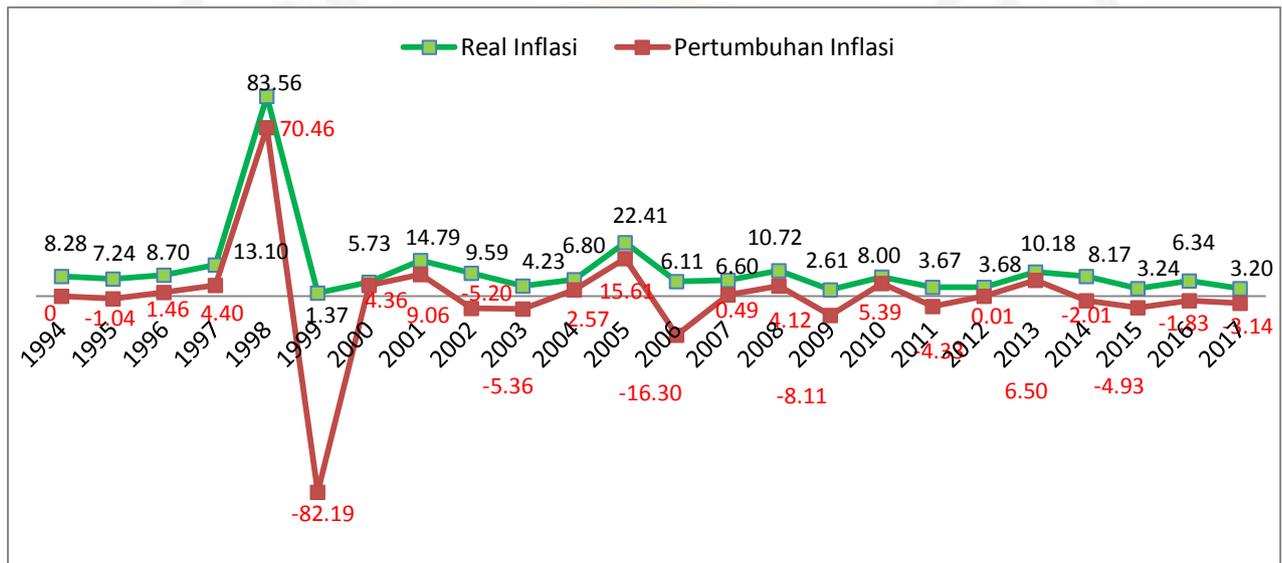
*Money supply shock* menyebabkan kenaikan output bergerak pada arah yang negatif. Hal ini terjadi karena uang beredar tidak lagi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun justru menimbulkan inflasi. Adanya kenaikan pada jumlah uang beredar yang diikuti oleh tingkat suku bunga menyebabkan output turun. Selanjutnya, tingginya tingkat inflasi sangat berpengaruh terhadap kenaikan output. Hal ini karena inflasi berpengaruh terhadap keputusan konsumsi masyarakat, pemerintah maupun bisnis. Dimana konsumsi adalah salah satu komponen penyusun permintaan agregat. Sehingga bila inflasi naik, maka akan menurunkan daya beli masyarakat. Ketika secara *agregat* tingkat konsumsi berkurang, maka output juga akan berkurang. Bila pergeseran *agregat demand* ini terus berlanjut dan menyebabkan sektor bisnis menjadilemah, maka akan menyebabkan perekonomian mengalami resesi.

Sumatera Utara yang memenuhi kriteria "*small and open economy*" menyebabkan setiap guncangan eksternal (*eksternal monetary shock*) yang terjadi dalam perekonomian dunia akan mempengaruhi perekonomian di Sumatera Utara. Adanya *external monetary shock* atau guncangan pada variabel moneter luar negeri bisa berupa *exchange rate shock*, yaitu perubahan sistem nilai tukar yang dianut maupun pergerakan nilai tukar domestik terhadap mata uang asing. Adanya guncangan pada nilai tukar bisa disebabkan oleh pertumbuhan jumlah uang beredar yang tinggi sehingga menyebabkan inflasi, konsekuensi dari inflasi yang tinggi adalah mata uang akan mengalami depresiasi (Mankiw, 2003:132).

Sumatera Utara dengan Medan sebagai pusat ekonomi merupakan satu pusat pertumbuhan (*growth center*) penting di Sumatera dan bahkan Indonesia. Dengan demikian Sumatera Utara merupakan satu lokomotif pertumbuhan

ekonomi Sumatera pada umumnya. Resesi ekonomi atau gejala inflasi yang dirasakan di Sumatera Utara dapat dijadikan indikasi awal bagi daerah-daerah lain yang merupakan *hinterlandnya* mulai dari Aceh hingga Lampung.

Adapun perkembangan tingkat inflasi yang terjadi di Sumatera Utara dapat, dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 1994-2017

**Gambar 1.1. Laju Inflasi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1994-2017 (%)**

Berdasarkan gambar 1.1 di atas menunjukkan trend tingkat inflasi di Sumatera Utara berfluktuatif dari tahun 1994-2017. Sumatera Utara mengalami inflasi yang cukup tinggi, yaitu pada saat pemerintahan orde lama dan terakhir pada tahun 1998. Krisis moneter pada pertengahan 1997 membuat laju inflasi di Sumatera Utara meningkat tajam sehingga tahun 1998 inflasi mencapai level 83,56% lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 77,63%. Disisi lain, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar minus 10,90% pada tahun 1998 dibandingkan dengan tahun 1997 sekitar 5,70%. Penurunan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara mengakibatkan

kesejahteraan masyarakat menurun drastis, sementara tingkat pengangguran meningkat (20,38%), sehingga intensitas kerawanan sosial meningkat. Disisi permintaan, penurunan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara disebabkan merosotnya permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. Konsumsi rumah tangga menurun disebabkan oleh melemahnya tingkat pendapatan riil akibat krisis yang berkepanjangan. Sementara itu, penurunan investasi swasta yang cukup besar disebabkan oleh beberapa masalah yang dihadapi dunia usaha. Disisi penawaran, penurunan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara disebabkan merosotnya komoditas ekspor dan sektor bangunan dan keuangan sebagai dampak melemahnya (depresiasi) nilai tukar rupiah (Laporan Perekonomian BI, 1998).

Disisi lain pergerakan inflasi mengalami penurunan sebesar 1,37% pada tahun 1999. Selain itu, dengan dinaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) pada tahun 2002, 2005, 2008 dan 2013 juga menjadi penyumbang inflasi yang cukup tinggi pada tahun-tahun tersebut (Bank Indonesia, 2014). Inflasi pada tahun 2002 (9,59%), tahun 2005 (22,41%), tahun 2008 (10,72%), dan tahun 2013 (10,18%). Inflasi tahun 2016 tersebut melampaui target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia di awal tahun yaitu 6,34% dan juga melampaui target inflasi pemerintah sebesar 5,3%. Peningkatan perkembangan laju inflasi di Sumatera Utara cenderung disebabkan karena terjadinya penurunan penawaran agregat, menurunnya penawaran agregat akan menyebabkan perusahaan mengurangi kapasitas produksinya akan barang dan jasa, sehingga permintaan terhadap jumlah tenaga kerja akan berkurang yang pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan jumlah pengangguran di Sumatera Utara.

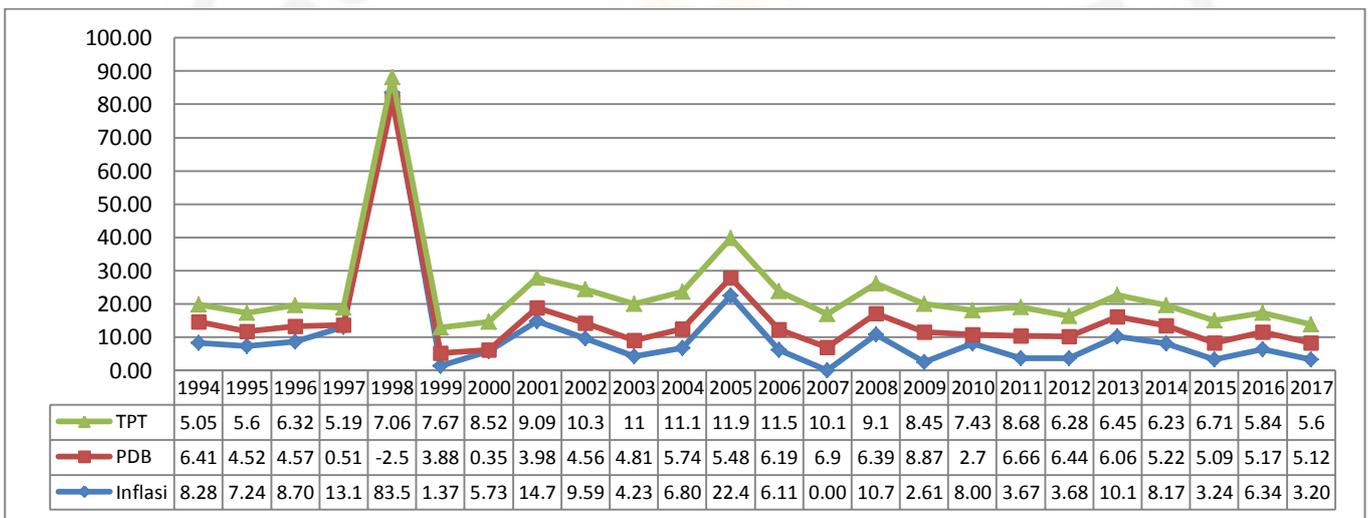
Sedangkan tahun 2017 tingkat inflasi mengalami penurunan sebesar 3,20%. Meningkatnya tekanan inflasi *administered prices* turut menahan penurunan tekanan inflasi lebih lanjut. Meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok ini terutama didorong oleh penyesuaian tarif PDAM. Penyesuaian tarif PAM akibat meningkatnya biaya operasional terkait dengan tarif listrik listrik yang terus meningkat, yang didorong oleh kenaikan minyak dunia yang masih berlanjut. Sementara itu, masih berlangsungnya program migrasi pelanggan 900 VA subsidi ke non subsidi turut mendorong meningkatnya tekanan inflasi komoditas tarif listrik. Disisi lain, sumber tekanan inflasi dari tarif angkutan relatif rendah seiring dengan ketersediaan alternatif moda transportasi yang masih memenuhi lonjakan permintaan masyarakat dalam menyemarakkan mudik Idul Fitri 2017 (Laporan Perekonomian, 2017)

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara adalah produk domestik bruto (PDB) atau produk domestik regional bruto (PDRB). Menurut Mankiw (2003;16) dalam analisis makro, Produk Domestik Bruto (PDB) dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian.

Menurut teori Keynes hubungan inflasi terhadap pendapatan, inflasi meningkat terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar kemampuan ekonominya maka pendapatan riil masyarakat akan menurun (Efek batas ekonomisnya). Permintaan masyarakat akan inflasi terhadap alokasi input, inflasi meningkat biaya barang-barang selalu melebihi jumlah barang produksi meningkat, maka kenaikan biaya produksi barang yang tersedia sehingga timbul apa yang barang pada gilirannya akan merubah pola alokasi disebut *inflationary*

gap”. Secara umum mereka input yang sudah ada. Efek inflasi terhadap output, yang penghasilannya tidak naik secepat kenaikan inflasi meningkat, pendapatan riil turun, konsumsi harga harus menerima bagian barang yang lebih turun, output turun kecil (Boediono, 1999:110).

Gambar1.2 menjelaskan perkembangan PDB di Sumatera Utara selama tahun 1994-2017.



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 1994-2017

### Gambar 1.2. Pergerakan Laju PDB dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Tingkat Inflasi di Sumatera Utara (dalam %)

Berdasarkan gambar1.2 diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDB mengalami peningkatan yang berfluktuatif mulai tahun 1994 sampai dengan tahun 2017. Pertumbuhan PDB terendah terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar minus 2,54% dan inflasi 83,56% dimana hal ini diakibatkan oleh krisis ekonomi global. Pertumbuhan PDB terjadi pada tahun 2001 mengalami penurunan dari 3,72% sedangkan inflasi mengalami peningkatan sebesar 14,79%. Selain itu tahun 2005 (5,48%) dan tahun 2008 (6,39%) terjadi penurunan laju PDB dibandingkan periode sebelumnya, sedangkan inflasi mengalami peningkatan tahun 2005

(22,41%) dan tahun 2008 (10,72%). Hal ini disebabkan meningkatnya *administered price* dari BBM yang memukul perekonomian, Namun, pada tahun 2015-2017 laju PDB mengalami peningkatan dari 5,09% menjadi 5,12% dan menyebabkan inflasi turun 3,24% menjadi 3,20%. Sedangkan menurut teori Keynes terhadap distribusi pendapatan disebut dengan *equity effect*. Keynes mengatakan apabila inflasi mengalami kenaikan maka pendapatan akan mengalami penurunan. Kenyataan ini menunjukkan sesuai dengan teori yang ada. Inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh PDB tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lainnya.

Tingkat inflasi yang tinggi dapat mendorong bank sentral menaikkan tingkat suku bunga sehingga menyebabkan kontraksi atau pertumbuhan negatif di sektor riil. Lebih jauh lagi akan menyebabkan pengangguran yang makin meningkat. Dalam jangka pendek kenaikan inflasi menunjukkan pertumbuhan perekonomian namun dalam jangka panjang kenaikan inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak buruk. Tingginya tingkat inflasi menyebabkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga barang impor. Masyarakat terdorong untuk membeli barang impor dibandingkan barang domestik. Hal ini berakibat nilai ekspor cenderung turun dan nilai impor naik. Kurang bersaingnya harga produk domestik menyebabkan rendahnya permintaan produk dalam negeri. Produksi menjadi berkurang karena sejumlah menyebabkan sejumlah pekerja kehilangan pekerjaannya sehingga pengangguran meningkat. pengusaha akan mengurangi produksi. Produksi berkurang menyebabkan sejumlah pekerja kehilangan pekerjaannya sehingga pengangguran meningkat.

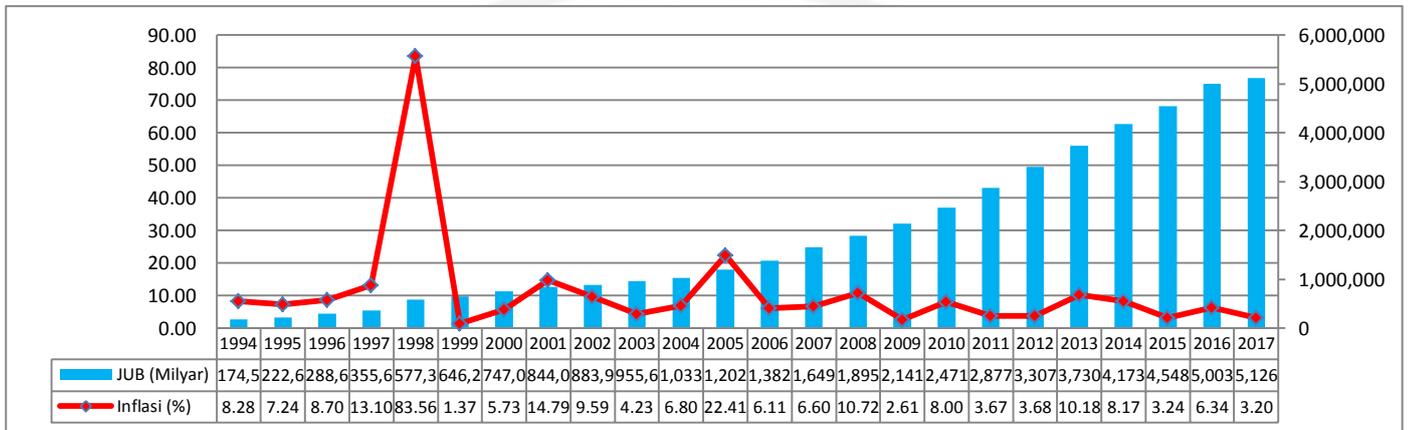
Hubungan terbalik (tradeoff) antara pengangguran dan inflasi disebut kurva Philips. A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan yaitu jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) maka pengangguran berkurang (Mankiw, 2003).

Di Sumatera Utara tingkat pengangguran terbuka berfluktuatif dimulai dari tahun 1994-2017. Di mana sebelum terjadinya krisis tingkat rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara adalah sebesar 7,96%. Dan setelah krisis pada tahun 1999-2005 jumlah tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara mengalami peningkatan dari 7,67% menjadi 10,91%. Hal ini disebabkan oleh inflasi yang mengalami peningkatan tahun tersebut sebesar 1,37% menjadi 22,41%, walaupun pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,48%. Pada tahun 2015-2017 terjadi penurunan jumlah tingkat pengangguran terbuka dari 6,71% menjadi 5,60% sedangkan tingkat inflasi tahun 2015-2017 mengalami penurunan dari 3,24% menjadi 3,20%. Hal ini disebabkan karena kesempatan kerja lebih rendah dari lapangan pekerjaan, sehingga hal ini menyebabkan tingkat pengangguran terbuka. Kenyataan ini menunjukkan ketidaksesuaian teori yang ada

Menurut Mankiw (2003), keeratan hubungan inflasi dengan jumlah uang beredar tidak dapat dilihat dalam jangka pendek. Teori inflasi ini bekerja paling baik dalam jangka panjang, bukan dalam jangka pendek. Berdasarkan teori kuantitas, fluktuasi yang terjadi pada harga disebabkan oleh naik turunnya volume uang yang beredar (JUB) dalam perekonomian. Irving Fisher menyatakan bahwa, “pada hakikatnya perubahan dalam jumlah uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama cepatnya atas harga”, yang berarti peningkatan persentase jumlah uang beredar akan sama dengan peningkatan persentase tingkat inflasi (Mankiw, 2003). Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah uang beredar memiliki pengaruh positif terhadap inflasi. Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat harga yang dapat diprediksikan oleh perekonomian dan dalam jangka panjang hal tersebut dapat berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi karena tingginya laju inflasi.

Pertumbuhan jumlah uang beredar (JUB) yang terjadi secara wajar akan memberikan pengaruh positif terhadap ekonomi dan pasar saham secara jangka pendek, namun pertumbuhan yang drastis akan memicu inflasi yang tentunya memberikan pengaruh negatif. Teori kuantitas uang adalah teori yang paling tua mengenai inflasi, dimana menyoroti peranan penambahan jumlah uang beredar dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga. Artinya bahwa, Pertama Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan jumlah uang beredar. Kedua, Dengan bertambahnya uang beredar secara terus menerus, masyarakat akan merasa kaya sehingga akan menaikkan konsumsinya, dan keadaan ini akan menaikkan harga laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar dan oleh harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa yang akan

datang. Ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara jumlah uang beredar dan laju inflasi.



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 1994-2017

**Gambar 1.3. Tingkat Inflasi dan Jumlah Uang Beredar (JUB) Tahun 1994-2017**

Jumlah uang beredar (M2) pada tahun 2002-2011 tersebut meningkat dari Rp. 883.903 miliar atau kisaran 4,72% menjadi Rp 2.877.220 miliar atau kisaran 16,42% dan menyebabkan inflasi mengalami penurunan sebesar 9,59% menjadi 3,67%. Terjadinya penurunan inflasi pada periode ini disebabkan oleh perkembangan nilai tukar yang terjaga stabil, ketersediaan pasokan bahan makanan yang cukup, kenaikan harga-harga barang yang dikendalikan pemerintah (*administered price*) yang minimal serta hasil dukungan pemerintah dalam mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi, terutama yang bersumber dari kenaikan harga-harga komoditas internasional ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Pada tahun 2015-2017 jumlah uang beredar (M2) (yoy) mengalami penurunan sebesar 8,99% menjadi 2,45% dan menyebabkan inflasi turun 3,24% menjadi 3,20%. Penurunan pertumbuhan jumlah uang beredar (M2) dipengaruhi oleh kontraksi operasi keuangan pemerintah pusat (Pempus). Kontraksi operasi

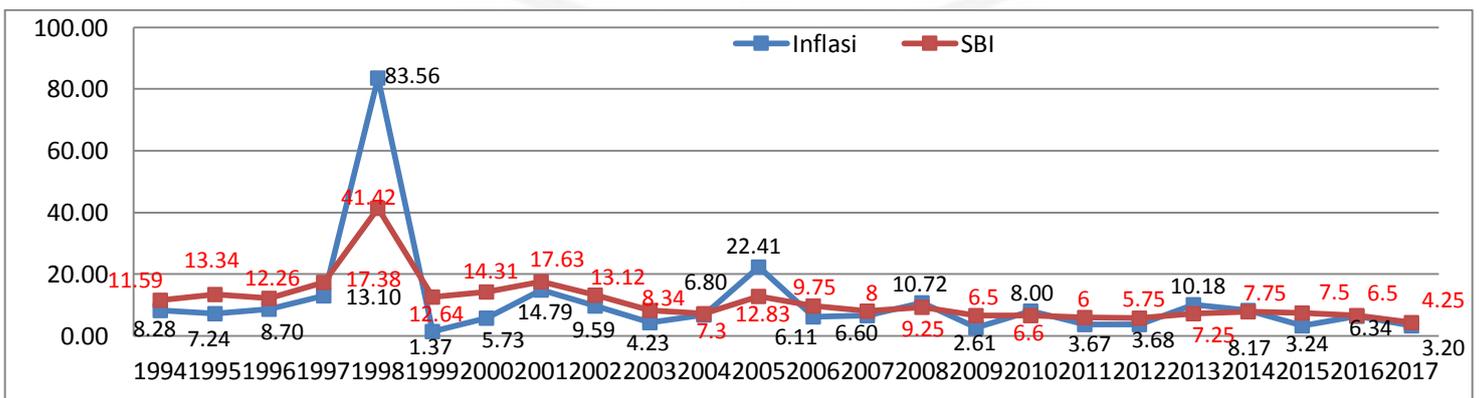
keuangan pemerintah pusat tercermin dari peningkatan kewajiban sistem moneter kepada pemerintah pusat dan penurunan tagihan BI sebesar 370,1 triliun, tumbuh 40,5%. Disisi lain peningkatan pertumbuhan kredit modal kerja (KMK) sebesar 8,3%, kredit investasi meningkat kisaran 4,8% serta kredit konsumsi (KK) meningkat sebesar 10,9% (www.bi.go.id). Kenyataan diatas menunjukkan hubungan negatif jumlah uang beredar (M2) dengan inflasi dan tidak sesuai dengan teori yang ada. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa, jika perputaran uang adalah tetap, maka kuantitas uang menentukan nilai dari output perekonomian. Dengan kata lain, perubahan output nominal yang dicerminkan dalam tingkat harga cukup banyak dipengaruhi oleh jumlah uang beredar. Lebih jauh dapat diartikan bahwa perubahan tingkat inflasi di Sumatera Utara sebagai akibat perubahan harga dalam periode tersebut cukup banyak dipengaruhi oleh jumlah uang beredar.

Perubahan suku bunga akan mempengaruhi perubahan inflasi sehingga Bank Indonesia telah mengimplementasikan kerangka kerja kebijakan moneter dengan *Inflation Targeting Framework*, yang mencakup elemen dasar yaitu penggunaan suku bunga sebagai sasaran operasional, perumusan kebijakan moneter, strategi komunikasi yang lebih transparan, dan penguatan koordinasi kebijakan dengan pemerintah. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektifitas kebijakan moneter dalam mencapai sasaran akhir kestabilan harga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan antara tingkat suku bunga dengan tingkat inflasi dijelaskan oleh Fisher (Mankiw, 2003) suku bunga nominal memiliki hubungan positif dan searah

dengan inflasi. Ketika tingkat inflasi tinggi, otoritas moneter menaikkan suku bunga nominal jangka pendeknya dengan tujuan mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian sehingga dapat menurunkan inflasi. Apabila kebijakan disinflasi yang dilaksanakan oleh otoritas moneter dapat berjalan secara konsisten, maka dampak kenaikan suku bunga terhadap penurunan likuiditas pada sektor riil akan direduksi dengan menurunnya harga-harga barang konsumsi.

Namun dalam praktiknya, suku bunga nominal jangka pendek diatur untuk mengarahkan pergerakan suku bunga perbankan. Apabila kenaikan suku bunga nominal direspon oleh suku bunga tabungan dan kredit pada bank umum (suku bunga kredit meningkat di atas tingkat suku bunga BI rate), peningkatan suku bunga tersebut dapat menurunkan investasi di sektor riil sehingga berdampak pada penurunan *output*. Penurunan *output* merupakan dampak dari kenaikan biaya produksi karena tingginya suku bunga yang berlaku, sehingga dapat memicu kenaikan harga dan semakin menekan inflasi. Sedangkan dalam jangka panjang akan mendorong arus modal masuk sehingga pengaruhnya terhadap suku bunga kredit lebih kecil.



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 1994-2017

**Gambar 1.4. Tingkat Inflasi dan Tingkat BI Rate di Sumatera Utara Tahun 1994-2017 (dalam %).**

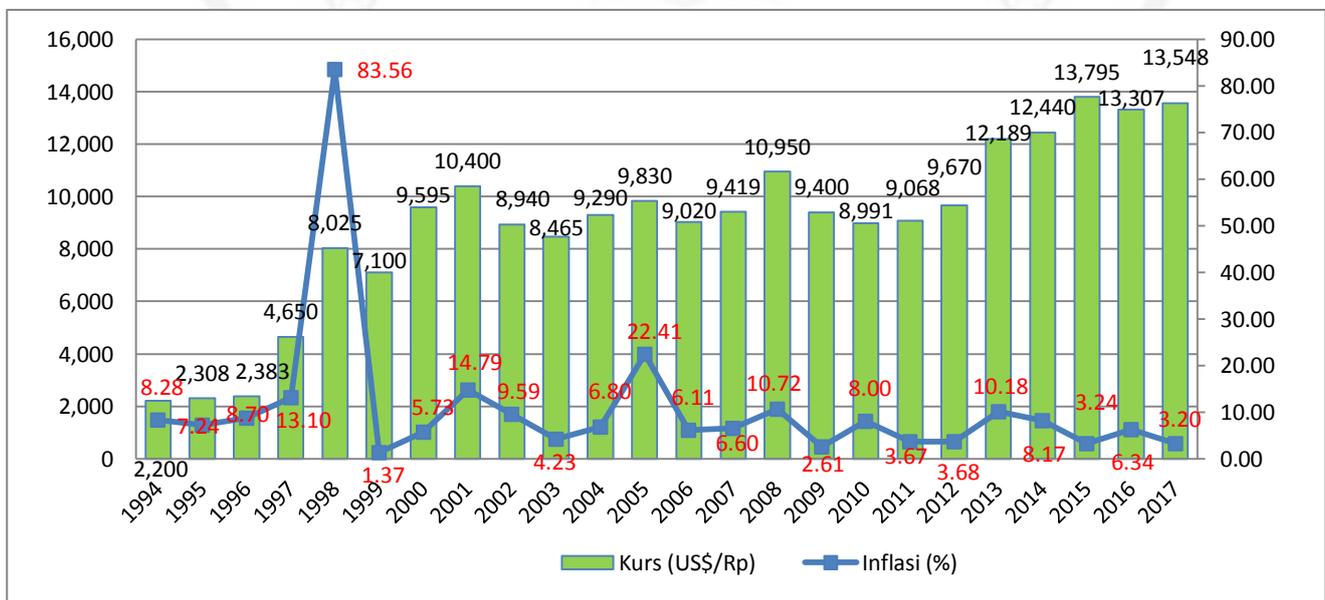
Jika dilihat hubungan suku bunga BI dengan tingkat inflasi di Sumatera Utara, pada tahun 2000-2005, inflasi naik dari 5,73% ke 22,41% dan hal ini diantisipasi oleh Bank Indonesia (BI) dengan menetapkan suku bunga BI sebesar 14,53% pada periode tersebut atau menurun menjadi 12,75% sehingga pertumbuhan jumlah uang beredar pada periode berikutnya meningkat dari 15,60% menjadi 16,33%. Perkembangan tingkat inflasi di Indonesia selama tahun 2015-2016 mengalami peningkatan dari 3,24% menjadi 6,34%. Namun suku bunga SBI pada periode tersebut mengalami penurunan dari 7,5% menjadi 6,5%. Meningkatnya inflasi pada periode ini bersumber dari semakin kuatnya pengaruh kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan, melemahnya nilai tukar rupiah, serta adanya keterbatasan produksi tanaman bahan makanan ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada.

Stabilitas nilai tukar dapat diartikan sebagai stabilnya nilai tukar terhadap harga barang dan jasa (inflasi) dan stabilnya nilai tukar terhadap mata uang negara lain. Ketika mata uang suatu negara terapresiasi (nilainya naik secara relatif terhadap mata uang lainnya), barang yang dihasilkan oleh negara tersebut di luar negeri menjadi mahal dan barang-barang luar negeri di negara tersebut menjadi lebih murah (asumsi harga domestik konstan di kedua negara). Sebaliknya, ketika mata uang suatu negara terdepresiasi, barang-barang negara tersebut yang di luar negeri menjadi lebih murah dan barang-barang luar negeri di negara tersebut menjadi lebih mahal (Mishkin,2009:111).

Depresiasi atau kenaikan nominal nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang negara lain akan meningkatkan harga barang impor karena melemahnya nilai tukar mata uang suatu negara. Jika kontribusi impor memiliki

peranan penting terhadap perekonomian, khususnya terhadap proses produksi, maka depresiasi nilai tukar mata uang dapat meningkatkan biaya produksi sehingga menyebabkan kenaikan tingkat harga domestik dan memicu kenaikan inflasi.

Hubungan nilai tukar terhadap perubahan tingkat harga dapat dijelaskan oleh persamaan berikut (Mankiw, 2003): Kurs nominal sama dengan kurs riil dikali rasio tingkat harga. Dimana P adalah tingkat harga domestik dan P\* adalah tingkat harga luar negeri. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai tukar nominal ( $e$ ) memiliki hubungan positif dengan tingkat harga domestik (P). Menurut teori paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*) menyatakan bahwa kurs antara dua mata uang akan melakukan penyesuaian yang mencerminkan perubahan tingkat harga dari kedua Negara. Teori PPP (*Purchasing Power Parity*) tidak lain merupakan aplikasi hukum satu harga secara keseluruhan, bukan harga dari satu barang (Mishkin, 2008:112).



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara dan BI, 1994-2017

Gambar 1.5. Tingkat Inflasi dan Kurs di Sumatera Utara Tahun 1994-2017.

Berdasarkan gambar 1.5 diatas menunjukkan bahwa trend pertumbuhan kurs tahun tampaknya berhubungan positif terhadap tingkat inflasi (Kurs Turun, maka Inflasi Naik). Pada tahun 1998 nilai tukar mengalami depresiasi, hingga menembus angka Rp. 8.025/USD jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya kisaran Rp. 4.650/USD yang menyebabkan inflasi kembali mengalami peningkatan menjadi 83,56% hal ini dikarenakan dampak dari krisis sektor keuangan. Lalu pada tahun 2013 nilai tukar rupiah kembali terdepresiasi hingga Rp 12.189/USD atau kisaran 26,04% yang menyebabkan inflasi kembali mengalami peningkatan menjadi 10,18%. Tekanan depresiasi rupiah terus meningkat pada tahun 2013. Perkembangan tersebut dipicu oleh peningkatan ketidakpastian global yang disebabkan oleh rencana pengurangan stimulus moneter oleh *The Fed (tapering off)* ditengah indikator masih menurun aktivitas ekonomi dan harga komoditas dunia (Laporan Perekonomian, 2013). Kondisi ini menunjukkan kenyataan yang sesuai dengan teori yang ada. Peningkatan inflasi pada tahun ini tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan faktor domestik yang terjadi sepanjang tahun 2016.

Inflasi yang tinggi dan tidak stabil begitu penting untuk diperhatikan mengingat dampaknya bagi perekonomian yang bisa menimbulkan ketidakstabilan, pertumbuhan ekonomi yang lambat, pengangguran yang selalu meningkat. Karena permasalahan inflasi bukan permasalahan yang ringan dan menyangkut banyak aspek, maka perlu pencegahan agar tidak terjadi inflasi yang berat. Kebijakan moneter mempunyai peranan penting dalam pengendalian inflasi, untuk itu perlu dideteksi faktor-faktor moneter yang mempengaruhi inflasi.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Terhadap Inflasi Di Sumatera Utara (Pendekatan *Two Stage Least Square*)**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Ada beberapa kondisi menarik yang menjadi fenomena dari gambar di atas yaitu ketika trend PDB pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan dari 5,09% menjadi 5,17% dan menyebabkan inflasi naik 3,24% menjadi 6,34%. Sedangkan menurut teori Keynes terhadap distribusi pendapatan disebut dengan *equity effect*. Keynes mengatakan apabila inflasi mengalami kenaikan maka pendapatan akan mengalami penurunan. Kenyataan ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori yang ada.

Fenomena berikutnya adalah jika dihubungkan antara trend suku bunga BI tahun 2015-2016 mengalami penurunan dari 7,5% menjadi 6,5%. Namun, perkembangan tingkat inflasi di Indonesia selama tahun 2015-2016 mengalami peningkatan dari 3,24% menjadi 6,34%. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada dimana hubungan antara tingkat suku bunga dengan tingkat inflasi dijelaskan oleh Fisher (Mankiw, 2003) suku bunga nominal memiliki hubungan positif dan searah dengan inflasi. Ketika tingkat inflasi tinggi, otoritas moneter menaikkan suku bunga nominal jangka pendeknya dengan tujuan mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian sehingga dapat menurunkan inflasi

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Faktor makro ekonomi apa yang

secara simultan mempengaruhi inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB) di Propinsi Sumatera Utara?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis pengaruh faktor makro ekonomi apa yang secara simultan mempengaruhi inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB) di Propinsi Sumatera Utara.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dengan melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis :**

##### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini bermanfaat memperdalam dan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh, penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi keilmuan khususnya mengenai penerapan teori inflasi.

##### **b. Bagi Pembaca**

Penelitian diharapkan bagi civitas akademika dapat menambah informasi atau sumbangan pemikiran dan bahan kajian penelitian tentang faktor yang mempengaruhi inflasi di Sumatera Utara.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu acuan untuk melakukan penelitian berikutnya. Dan menganalisis pengaruh masing-masing faktor yang diteliti dapat dipakai sebagai informasi bagi Pemerintah, hasil yang diperoleh mungkin bisa dipakai sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien yang terkait dengan laju inflasi dan determinannya.

